

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP,2010). Laporan keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja, Laporan Operasional, Neraca Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010):

- a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka, dan menyeluruh atas pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP,2010). Pelaporan keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang undangan.
- b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA)
- b) Laporan Operasional (LO)
- c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- d) Neraca
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan iktisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyajian anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legelatif sesuai peraturan perundang undangan (SAP 2010). Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/defisist
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Operasional-(LO)

Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Pelaporan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang tersiri dari ekuitas awal, surplus/defisit –LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan equitas dana pada tanggal tertentu (SAP 2010). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan kewajiban yang mencakup jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan dan jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang kurangnya pos-pos berikut:

- a) Aset Lancar
- b) Aset tetap
- c) Aset lainnya
- d) Kewajiban jangka pendek
- e) Kewajiban jangka panjang
- f) Ekuitas dana lancar
- g) Ekuitas dana investasi.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terperinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
- c. yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rekomendasi BPK-RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012;
- u. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- v. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012;
- w. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tanggal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan pemendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Pendidikan tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
2. Laporan Realisasi Anggaran SKPD
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Neraca Komparatif Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga

Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Kebijakan Akuntansi

- 2.1 Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan Keuangan Secara Umum
- 2.2. Basis dan Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 2.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 2.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD

Bab III Penjelasan Pos-Pos laporan Keuangan

- 3.1 Penjelasan Pos-Pos laporan Realisasi Keuangan
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Belanja
- 3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 3.2.1 Pendapatan
 - 3.2.2 Beban
- 3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.4 Penjelasan Pos Pos Neraca
 - 3.4.1 Aset
 - 3.4.2 Kewajiban
 - 3.4.3 Ekuitas Dana

Bab IV Penutup Lapiran Tambahan

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

2.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis akrual untuk realisasi anggaran bahwa pendapatan dan belanja diakui saat transaksi telah terjadi atau diterimanya suatu manfaat. Untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

2.3.1. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal.

2.3.2 Kas dan Setara Kas Bendahara Penerimaan

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan oleh bendahara pengeluaran yang digunakan untuk mencatat kas setara.

2.3.3 Persediaan

Berdasarkan surat edaran gubernur Jawa tengah nomor : 900/010567 tanggal 23 Oktober 2014 bahwa perlakuan persediaan adalah sebagai berikut:

- Pencatatan persediaan menggunakan metode pereodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan dalam berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2017.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan di neraca, tetapi diungkapkan di CALK.

2.3.4. Pengukuran Aset Tetap Secara Umum

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya dipindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembeliannya.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.

- g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau dinilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

2.3.5. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

2.3.6. Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

2.3.7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai.

Biaya ini meliputi harga beli, atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, Notaris dan pajak.

2.3.8. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

2.3.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yaitu berupa buku buku dan peralatan sekolah diukur biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

2.3.10 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data asset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi yang dilakukan antara pengurus barang Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, karena asset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka asset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

2.3.11. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

2.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2.3.13 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Inventasi
Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.
- Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

2.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap, serta mengacu pada Peraturan Gubernur No 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dimana kebijakan akuntansi yang dilakukan setiap tahun anggaran dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1.1 PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga adalah Rp. 64.737.305.235,- terealisasi sebesar Rp. 62.456.305.000 yang terdiri dari pendapatan restribusi daerah berupa pendapatan sewa gedung GOR Rp. 41.865.000,- dan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa dana BOS yang ditransfer ke sekolah SD dan SMP di Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 62.414.440.000,-. Untuk sisa dana bos yang direncanakan masuk dalam pendapatan terdiri sisa bos SD 1.149.781.300,00 dan sisa bos SMP Rp. 1.058.562.694,00 yang menjadi bagian dari anggaran pendapatan diatas,pada kenyataannya dana tersebut sudah ada di sekolah sebagai sisa penggunaan dana BOS tahun 2016, sehingga nilai tersebut tidak dimasukkan dalam pendapatan daerah.

3.1.2. BELANJA

3.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 515.617.267.819,00 dari anggaran Rp. 540.400.554.327,00 atau 95%.

3.1.2.2. Belanja Pegawai

Belanja pegawai tahun anggaran 2017 adalah Rp. 431.331.135.283,00 dengan perincian sebagai berikut;

NO	URAIAN	ANGGARAN	2017	2016
	Belanja Pegawai	450.116.893.577	431.331.135.283	475.958.078.098
1	Belanja Tidak Langsung	419.684.319.606	405.546.182.387	465.880.066.348
2	Belanja Langsung	30.432.573.971	25.784.952.896	10.078.011.750

3.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa tahun 2017 sebesar Rp. 37.501.209.402 dengan rincian sebagai berikut

NO	URAIAN	ANGGARAN	2017	2016
1	BELANJA BARANG	41.090.040.441	37.501.209.402	7.497.848.029

3.2.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 46.784.923.134 dari anggaran senilai Rp.49.193.620.309. dengan rincian sebagai berikut

Belanja Barang Modal

NO	URAIAN	ANGGARAN	2017	2016
1	BELANJA TANAH	0	0	0
2	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	20.231.156.423	18.355.960.254	3.405.439.400
3	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	27.892.563.886	27.409.964.880	16.082.716.990
4	BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.058.000.000	1.016.613.000	1.222.250.000
5	BELANJA ASET TETAP LAINNYA	11.900.000	2.385.000	101.548.000
JUMLAH BELANJA MODAL		49.193.620.309	46.784.923.134	20.811.954.390

3.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERSIONAL (LO)

3.2.1 PENDAPATAN

Pendapatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga adalah Rp. 62.456.625.000 yang terdiri dari pendapatan restribusi daerah berupa sewa gedung GOR Rp. 41.865.000,- dan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa dana BOS yang ditransfer ke sekolah SD dan SMP di Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 62.414.760.000,-. Untuk sisa dana Bos SD dan SMP tidak dimasukkan di pendapatan karena uang tersebut adalah sisa belanja BOS 2016 yang ada di rekening kas sekolah sejak awal tahun anggaran 2017.

3.2.2 BEBAN

Beban operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung selama Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 470.083.859.902 dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN BEBAN OPERASIONAL

NO	URAIAN	2017	2016
91	BEBAN OPERASI	470.083.859.902	542.319.075.693
911	Beban Pegawai	432.606.476.393	488.738.839.439
912	Beban Barang dan Jasa	37.477.383.509	53.580.236.254

3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan ekuitas Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
Ekuitas Awal	
Surplus Defisit LO	437.901.815.106,41 (407.627.554.902)
Koreksi Kesaalahan dan Perubahan Kebijakan	(900.360.283,00)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	455.643.201.726,00
Ekuitas Akhir	485.017.101.647,41

Dampak akumulatif perubahan kebijakan senilai Rp. 900.360.283,00 adalah penghapusan saldo kas awal di Bendahara Bos karena untuk SMA/SMK dan SMPLB sudah dikoordinir di provinsi, sehingga laporan keuangan BOS juga di koordinasi oleh provinsi.

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1. Aset

3.4.1.1. Aset Lancar

3.4.1.1.1. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 27.075.560,- Nilai tersebut adalah sisa uang belanja selama tahun anggaran. Saldo kas tersebut telah di setor ke Kas Umum Daerah Kabupaten temanggung.

3.4.1.1.2. Kas di Bendahara Bos

Kas di bendahara bos per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 5.206.723.857,- Uang tersebut adalah sisa dari penggunaan dana BOS yang ditransfer dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya ke masing-masing sekolah negeri di wilayah Kabupaten Temanggung. Uang tersebut tidak dikembalikan ke Kas Umum Daerah tetapi tetap disimpan di kas sekolah yang ada di rekening bank atau brankas, uang tersebut akan digunakan untuk melanjutkan kegiatan operasional sekolah di tahun 2018. Perhitungan untuk sisa kas akhir periode 2017 adalah sebagai berikut;

Perhitungan Kas Awal Bos

JENJANG	JUMLAH	PENYESUAIAN KE PROPENSI	KAS AWAL BEND BOS 2017
SD	1.571.774.409		1.571.774.409
SMP	1.188.111.278	31.109.131	1.157.002.147
SMA	869.251.152	869.251.152	-
JUMLAH	3.629.136.839	900.360.283	2.728.776.556

Sisa kas bendahara bos pada awal 2017 terdiri dari sisa kas di SD, SMP, SMPLB, SMA dan SMK. Seiring beralihnya penanganan SMA, SMK dan SMPLB ke provinsi maka pada awal tahun 2017 untuk sisa kas bos di SMA, SMK dan SDLB dihapus.

PERHITUNGAN PENGGUNAAN DANA BOS SD

Keterangan		JUMLAH
SISA BOS 2016		1.571.774.409
PENDAPATAN		
TRANSFER BOS KE REK SD 2017	43.340.960.000	
KURANG LEBIH SALUR	217.120.000	-
PENDAPATAN BOS SESUAI ALOKASI		43.123.840.000
DANA BOS TERSEDIA TAHUN 2017		44.695.614.409
BELANJA SISA BOS 2016		
BELANJA PEGAWAI	220.363.909	
BELANJA BARANG JASA	584.125.145	
BELANJA MODAL	343.508.319	+
JUMLAH BELANJA SISA BOS 2016		1.147.997.373
BELANJA BOS PERIODE 2017		
BELANJA PEGAWAI	8.516.765.664	
BELANJA BARANG JASA	20.737.673.598	
BELANJA MODAL	10.433.431.783	+
JUMLAH BELANJA BOS PERIODE 2017		39.687.871.045
SISA BOS 2017 SD		3.859.745.991

PERHITUNGAN PENGGUNAAN DANA BOS SMP

Keterangan		JUMLAH
SISA BOS 2016		1.157.002.147
PENDAPATAN		
TRANSFER BOS KE REK SMP 2017	19.336.000.000	
KURANG LEBIH SALUR	45.400.000	-
PENDAPATAN BOS SESUAI ALOKASI		19.290.600.000
DANA BOS TERSEDIA TAHUN 2017		20.447.602.147
BELANJA SISA BOS 2016		
BELANJA PEGAWAI	218.077.518	
BELANJA BARANG JASA	504.435.376	
BELANJA MODAL	334.349.800	+
JUMLAH BELANJA SISA BOS 2016		1.056.862.694
BELANJA BOS PERIODE 2017		
BELANJA PEGAWAI	3.895.795.140	
BELANJA BARANG JASA	9.146.872.606	
BELANJA MODAL	5.001.093.841	+
JUMLAH BELANJA BOS PERIODE 2017		18.043.761.587
SISA BOS 2017 SMP		1.346.977.866

TOTAL SISA DAN BOS 2017

5.206.723.857

3.1.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional dinas dan barang-barang yang dimaksud untuk tidak dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari perhitungan fisik dan harga pengadaan barang terakhir (Berita Acara) yang terlampir.

Nilai persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 5.643.200,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Rek	Nama/Jenis Persediaan	Nilai persediaan
1	1170101	Persediaan Alat Tulis Kantor	3.444.000
2	1170103	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	308.000
3	1170104	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	96.000
4	1170105	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.197.700
5	1170109	Persediaan Barang Cetakan	597.500
Jumlah Persediaan			5.643.200

3.1.1.2. Aset Tetap

Nilai aset tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 496.453.690.944,84 dengan rincian sebagai berikut;

Kode	Nama Rekening	2017	2016
131	Tanah	43.522.792.216,00	43.516.779.216,00
132	Peralatan dan Mesin	100.508.394.090,99	89.346.655.850,99
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	61.840.180.624,30	61.840.180.624,30
		38.668.213.466,69	27.506.475.226,69
133	Gedung dan Bangunan	494.777.763.488,00	467.835.659.291,00
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	164.658.209.555,90	164.658.209.555,90
		330.119.553.932,10	303.177.449.735,10
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.985.985.308,00	5.403.718.733,00
13703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	1.785.416.475,21	1.785.416.475,21
		4.200.568.832,79	3.618.302.257,79
135	Aset Tetap Lainnya	58.621.684.093,14	50.505.022.971,14
13704	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	5.881.068.595,88	5.881.068.595,88
		52.740.615.497,26	44.623.954.375,26
13601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	201.947.000,00	201.947.000,00
13	ASET TETAP	469.453.690.944,84	422.644.907.810,84

3.1.1.3. Aset Lainnya

Nilai aset lainnya pada periode 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 12.233.061.331. Dengan rincian sebagai berikut :

Nama Rekening	2017	2016
<i>Aset Tidak Berwujud Lainnya</i>	133.663.190,00	129.083.190,00
<i>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</i>	63.960.268,75	63.960.268,75
	69.702.921,25	65.122.921,25
<i>Aset Rusak</i>	27.531.198.743,00	27.531.198.743,00
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Rusak</i>	15.367.840.333,68	15.367.840.333,68
	12.163.358.409,32	12.163.358.409,32
ASET LAINNYA	12.233.061.330,57	12.228.481.330,57

3.1.2. Kewajiban

3.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dipenuhi kurang dari 1 tahun. Kewajiban timbul setelah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga telah menikmati manfaat tetapi belum melakukan pembayaran. Sampai dengan akhir periode 31 Desember 2017, Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung masih memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 1.909.093.245,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1 Utang Perhitungan dengan Pihak Ketiga

Utang jangka pendek dari perhitungan dengan pihak ketiga adalah Rp. 0,-. Pajak yang timbul dari kegiatan pembayaran dan belanja telah dilunasi sebelum 31 Desember 2017.

JENIS PAJAK	UTANG PAJAK
PPN	Rp -
PPh 21	Rp -
PPh 22	Rp -
PPH 23	Rp -
PPh PASAL 4	Rp -
JUMLAH	Rp -

3.1.2.1.2 Utang Belanja

Utang belanja yang dimiliki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sampai dengan akhir periode 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.909.093.245,00 terdiri dari:

NO	JENIS UTANG	JUMLAH
1	Utang jasa kantor	14.385.910,00

	Beban Jasa listrik	7.023.370,00
	Beban Jasa telepon	6.368.640,00
	Beban Jasa air	993.900,00
	Honoraium Cleaning Service	6.755.135,00
2	Utang tambahan penghasilan berdasar beban kerja	878.277.200,00
3	Utang honor GTT/PTT	1.009.675.000,00
Jumlah Utang Belanja		1.909.093.245,00

3.1.3. Ekuitas

Keterangan	Jumlah
Ekuitas Awal	437.901.815.106,41
Surplus Defisit LO	(407.627.554.902)
Koreksi Kesaalahan dan Perubahan Kebijakan	(900.360.283,00)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	455.643.201.726,00
Ekuitas Akhir	485.017.101.647,41

Ekuitas awal tahun adalah sebesar Rp. 437.901.815.106,41,. Selama Tahun Anggaran 2017 terjadi defisit LO sebesar Rp 407.627.554.902, dan adanya penghapusan aktiva lancar yang mengurangi kas di bendahara bos senilai Rp. 900.360.283,00 dikarenakan beralihnya penanganan BOS jenjang SMA, SMK dan SDLB ke Provinsi Jawa Tengah. Selama tahun anggaran 2017, ekuitas yang dikosolidasikan adalah sebesar Rp. 455.643.201.726,00. Sehingga untuk akhir Tahun anggaran 2017 ini ekuitas bertambah menjadi Rp. 485.017.101.647,41

BAB IV
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga disusun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan-laporan keuangan.